

BAB I

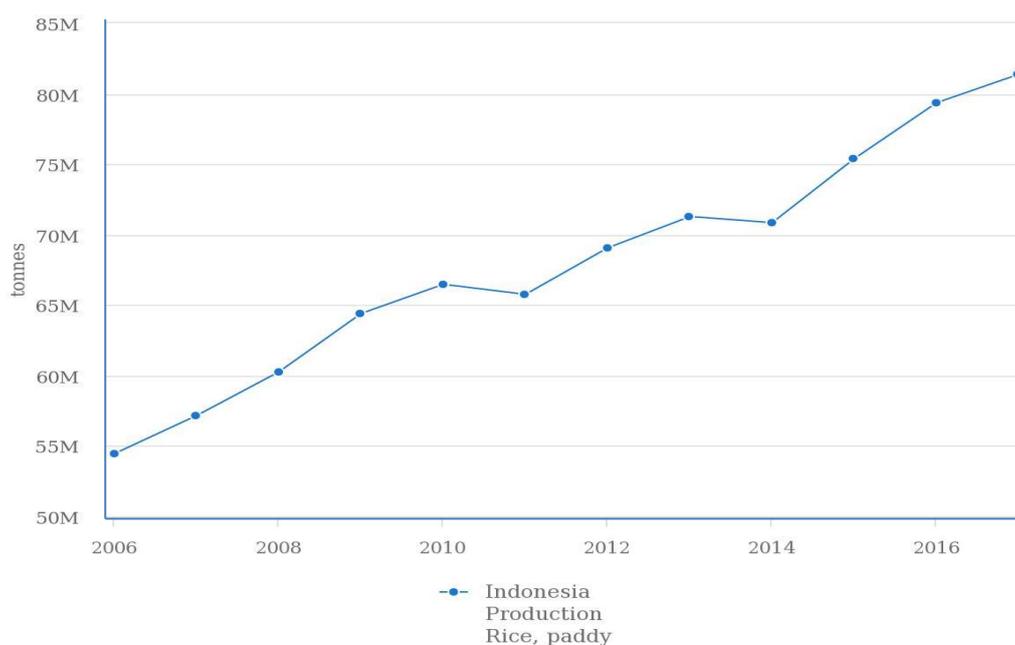
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik Indonesia pada Tahun 2016 mencatatkan pada publikasinya bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi yakni pada kisaran 1,36 persen per tahun terhitung pada periode Tahun 2010 hingga 2016. Angka ini sebenarnya sedikit menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 1,49 persen per tahun, akan tetapi laju pertumbuhan ini masih terbilang tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Adanya peningkatan populasi penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan permintaan kebutuhan pangan, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan terdapat aspek penting yang harus menjadi fokus pemerintah ialah mengenai pemenuhan ketersediaan beras masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia dengan hasil produksi komoditas pertanian yang tinggi, harus mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya salah satu komoditas tanaman pangan adalah padi. Padi menjadi komoditas tanaman pangan prioritas petani karena padi sebagai komoditas yang menghasilkan beras, merupakan bahan pangan yang paling tinggi dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia setelah jagung, kedelai, ubi, telur, susu dan sayur. Menurut *Food Agriculture Organization (FAO)* produksi padi di Indonesia selama 12 tahun mengalami fluktuasi peningkatan sebesar 47,2 persen (FAO, 2017), persentase angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan produksi padi dalam negeri. Penurunan produksi padi selama 12 tahun tersebut hanya terjadi pada dua kali kurun waktu yakni pada Tahun 2010 – 2011 dari 66,47 juta ton turun menjadi 65,76 juta ton, selanjutnya

pada Tahun 2013 – 2014 dari 71,28 juta ton turun menjadi 70,85 juta ton yang mana penurunan produksi tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya dan tahun lainnya selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Realitanya peningkatan produksi masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena Indonesia masih tetap melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Perkembangan produksi padi Indonesia periode Tahun 2006 – 2017 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Perkembangan Produksi Padi Indonesia (ton/tahun)
Periode Tahun 2006 – 2017 (Sumber : FAO, 2017)

Peningkatan produksi padi selaras dengan peningkatan luas panen (*harvested area*) padi secara kumulatif tingkat nasional. Kementerian Pertanian mencatatkan luas panen padi nasional berfluktuasi meningkat setiap tahunnya dari Tahun 2006 hingga 2017, hingga pada akhir Tahun 2017 tercatat luas panen padi pada luasan 15,78 juta ha menjadi luas panen padi nasional terluas pada satu dekade terakhir. Fenomena ini seiring dengan program pemerintah khususnya oleh Kementerian Pertanian yang memiliki visi untuk menjadikan

Indonesia sebagai lumbung pangan dunia setelah Indonesia menjadi negara produsen padi ke tiga terbesar di dunia setelah China dan India yang menduduki dua tingkat di atasnya. Melihat fenomena tersebut dengan tingkat produktivitas dan luas panen padi Indonesia yang tinggi bukan hal yang tidak mungkin jika Indonesia menjadi eksportir beras terbesar, akan tetapi mimpi ini masih belum dapat terwujud dengan tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia yang juga masih sangat tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Masyarakat Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap komoditas beras dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, padahal masih banyak alternatif pangan selain beras yang bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam hal pemenuhan asupan karbohidrat seperti jagung, kentang, ubi jalar, singkong, sagu ataupun alternatif pangan lainnya yang banyak tersedia di pasaran.

United States Department of Agriculture (USDA) pada Tahun 2017 menunjukkan tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia meningkat setiap tahunnya dengan persentase peningkatan tertinggi pada level 7,24 persen yang terjadi pada Tahun 2013 selama periode Tahun 2006 hingga 2017. Peningkatan konsumsi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang juga mengalami peningkatan tiap tahun, tercatat jumlah penduduk Indonesia pada akhir Tahun 2017 sejumlah 261,89 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan produksi padi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional. Produksi padi ditingkatkan melalui perluasan luas lahan baik sawah maupun ladang secara nasional sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas padi secara nasional, peningkatan produksi akan meningkatkan pula penawaran komoditas beras di pasaran. Perkembangan luas panen, produksi padi nasional, konsumsi dan jumlah penduduk Indonesia disajikan pada Tabel 1.1.

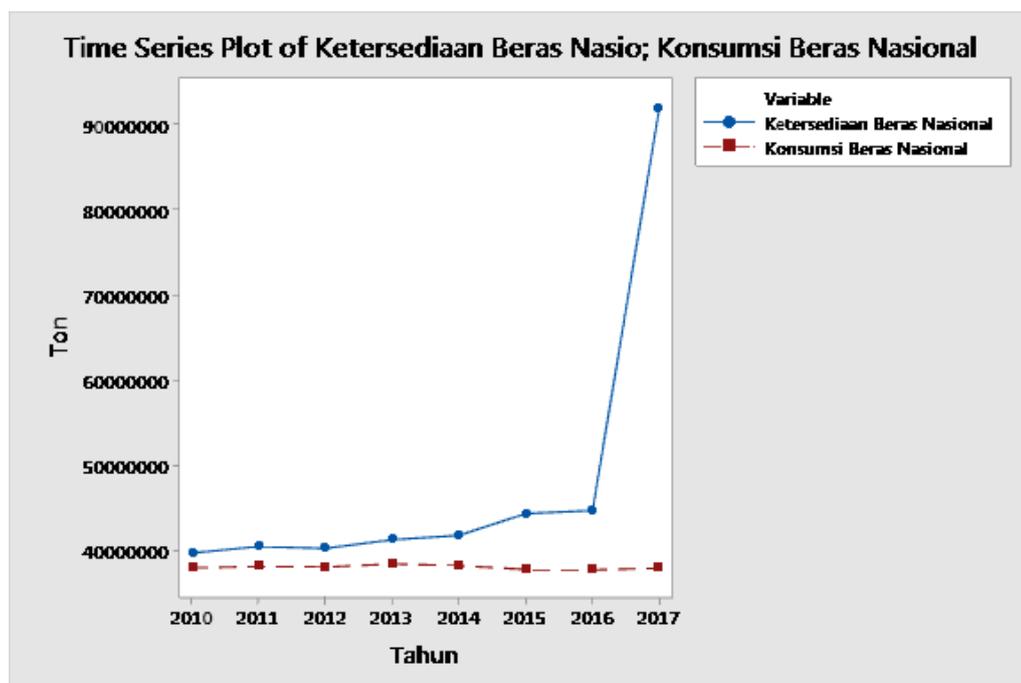
Tabel 1.1. Perkembangan Luas Panen Padi (ha/tahun), Produksi Padi Nasional (ton/tahun), Konsumsi Beras Nasional (ton/tahun), dan Jumlah Penduduk Indonesia (jiwa/tahun) Periode Tahun 2006 – 2017

Tahun	Luas Panen Padi	Produksi Padi Nasional	Konsumsi Beras Nasional	Jumlah Penduduk
2006	11.786.430	54.454.936	35.900.000	229.838.202
2007	12.147.637	57.157.436	36.350.000	232.989.141
2008	12.327.425	60.251.072	37.100.000	236.159.276
2009	128.88.570	64.398.888	38.000.000	239.340.278
2010	13.253.450	66.469.392	38.044.000	242.524.123
2011	13.203.643	65.756.904	38.188.000	245.707.511
2012	13.445.524	69.056.128	38.127.000	248.883.232
2013	13.835.252	71.279.712	38.500.000	252.032.267
2014	13.797.307	70.846.465	38.300.000	255.131.116
2015	14.309.364	75.397.841	37.850.000	258.162.113
2016	15.044.957	79.355.000	37.800.000	258.704.986
2017	15.788.061	81.382.000	38.000.000	261.890.872

Sumber : Kementerian Pertanian; FAO dan USDA (2017)

Berdasarkan pada Tabel 1.1. dengan volume konsumsi beras oleh masyarakat Indonesia pada Tahun 2017 sebesar 38 juta ton, sedangkan volume produksi padi pada tahun yang sama sebesar 81,38 juta ton dikonversikan menjadi beras (konversi = 58,13%) sehingga didapatkan volume produksi beras pada Tahun 2017 sebesar 47,3 juta ton. Data ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 Indonesia masih pada kondisi surplus beras sebesar 9,3 juta ton, akan tetapi kondisi tersebut tidak menjamin Indonesia untuk dapat berswasembada pangan dikarenakan masih banyak masyarakat di berbagai daerah yang mengalami kerawanan pangan sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras melalui perdagangan beras internasional. USDA pada Tahun 2015 mempublikasikan bahwa negara Thailand, India dan Vietnam merupakan negara eksportir utama beras dunia dengan *share* 65,01%, sedangkan China, Nigeria, Filipina, dan Indonesia merupakan negara importir beras dunia dengan *share* 23,96%. Indonesia merupakan negara importir ke tiga beras dunia setelah Filipina dan China. Impor beras Indonesia berasal dari tiga negara utama yaitu Vietnam, Thailand, dan India. Besaran persentase masing-

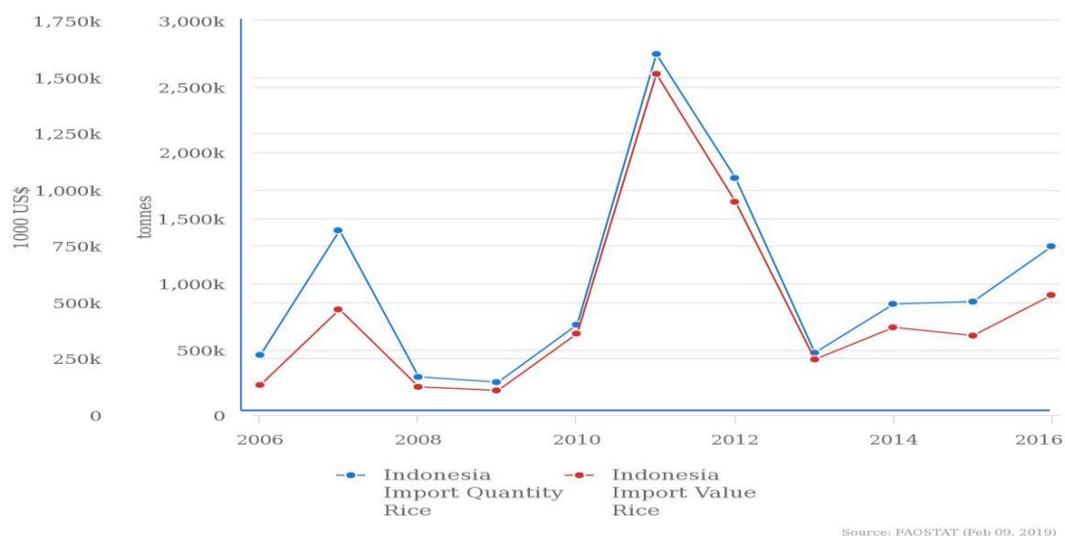
masing adalah Vietnam 53,02%, Thailand 29,07%, dan India 9,61% versi (USDA, 2015).



Gambar 1.2. Perkembangan Ketersediaan Beras Nasional (ton/tahun) Terhadap Konsumsi Beras Penduduk Nasional Periode Tahun 2010 – 2017 (Sumber : BKP Kementerian Pertanian, 2019)

Fluktuasi yang terjadi pada tiga faktor utama yang menjadi indikator dari ketersediaan beras secara nasional yakni luas panen padi, produksi padi dan konsumsi beras nasional seperti yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan dampak terhadap terjadinya fluktuasi ketersediaan beras secara nasional. Ketersediaan beras nasional berfluktuasi meningkat selama periode Tahun 2010 – 2017, bahkan pada akhir Tahun 2017 ketersediaan beras nasional sangat melimpah lebih dari dua kali lipat dibandingkan 7 tahun sebelumnya yakni sebesar 92 juta ton beras yang tersedia pada wilayah-wilayah di Indonesia. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempublikasikan data neraca bahan makanan pada komoditas beras secara nasional sebagai tolak ukur ketersediaan beras yang tersedia untuk konsumsi beras penduduk pada setiap tahunnya diukur melalui ketersediaan beras per kapita secara nasional.

Terjadinya fenomena ketergantungan impor beras Indonesia dari ke tiga negara tersebut secara praktis akan mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran komoditas beras domestik. Perkembangan volume dan nilai impor Indonesia pada periode Tahun 2006 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.3. sebagai berikut.



Gambar 1.3. Perkembangan Volume (ton) dan Nilai Impor (USD) Beras Indonesia Periode Tahun 2006 – 2016 (Sumber : FAO, 2018)

Impor beras di Indonesia pada sepanjang Tahun 2006 hingga 2016 mengalami fluktuasi baik dari aspek volume maupun nilai impornya, volume impor terbesar yang pernah dilakukan Indonesia terjadi pada Tahun 2011 yakni pada angka 2,75 juta ton dengan nilai impor sebesar 1,51 juta US\$ hal ini dikarenakan pada Tahun 2011 stok beras nasional hanya menyisakan surplus sebesar 36 ribu ton yang mengindikasikan Indonesia mengalami kerawanan pangan pada tahun tersebut. Setelah pada Tahun 2011 terjadi impor terbesar sepanjang satu dekade terakhir, maka pada periode Tahun 2011-2013 terjadi penurunan impor beras yang sangat drastis dan tercatat volume impor beras Indonesia terkecil terjadi pada Tahun 2013 pada besaran 472 ribu ton dengan nilai impor tidak lebih dari 246 ribu US\$ (lihat Gambar 1.2). Jumlah impor Indonesia memang telah mengalami penurunan yang drastis akan tetapi telah

mengalami peningkatan kembali hingga akhir Tahun 2016 dengan volume impor sebesar 1,28 juta ton dengan nilai impor 532 ribu US\$, menunjukkan bahwa Indonesia masih ketergantungan impor beras yang akan berdampak terhadap ketahanan pangan secara nasional.

Ketahanan pangan atau *food security* sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional suatu negara dikarenakan ketahanan pangan merupakan isu paling strategis khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan” (Mariyani, 2017). Menurut Gunawan (2017) ketahanan pangan terdiri dari empat sub-sistem antara lain adalah : ketersediaan pangan (*food availability*), aksesibilitas pangan (*food accesbility*), pemanfaatan pangan (*food utilization*), dan stabilitas pangan (*food stability*), sedangkan status gizi (*nutritional status*) merupakan *outcome* dari konsep ketahanan pangan. Apabila ke empat sub-sistem tersebut dipenuhi dengan baik dan terintegrasi maka ketahanan pangan sudah dipastikan akan terwujud.

Sub-sistem yang dirasa paling penting dari ke empat sub-sistem diatas adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan hasil penjumlahan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan Nasional serta impor jika ke dua sumber pangan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Mariyani, 2017). Kondisi akan ketersediaan beras yang dipenuhi kekurangannya melalui cara impor merupakan cara yang instan dan tidak menyelesaikan suatu permasalahan ketersediaan beras di suatu

negara bahkan akan semakin menambah permasalahan misalnya akan berdampak pada kondisi komoditas domestik yang dihasilkan. Suatu negara akan sangat tergantung terhadap impor dan ini tentu tidak sesuai dengan konsep ketahanan pangan yang dicitakan bersama.

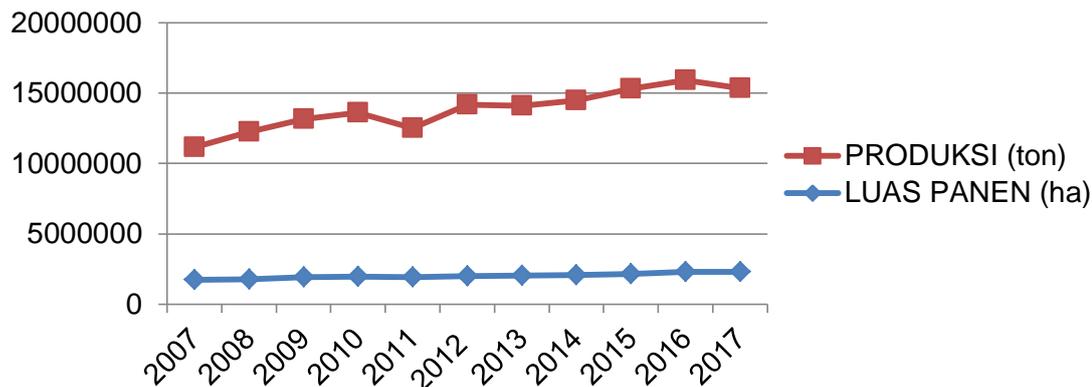
Rifa'i, Erry, dan Nurmayasari (2018) mengemukakan bahwa ketergantungan impor di Indonesia mengindikasikan perlunya pengelolaan stok pangan yang lebih efisien, baik pada tingkat pemerintah maupun rumah tangga petani, agar dapat mengantisipasi terjadinya masalah ketersediaan beras di suatu daerah. Badan Usaha Logistik (BULOG) memegang peranan sebagai lembaga pemerintah yang mengatur ketersediaan pangan di suatu wilayah, pada tingkat rumah tangga petani terdapat kelembagaan lumbung pangan yang turut andil dalam memegang peranan.

Lumbung pangan suatu daerah memegang peranan penting sebagai pengelola cadangan pangan dalam mendukung ketersediaan beras suatu daerah sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat wilayah maupun nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2013, yang mana dalam peraturan tersebut banyak mengatur mengenai peringatan *World Bank* kepada Indonesia mengenai masalah cadangan pangan nasional di Tahun 2008, memaparkan situasi iklim dan cuaca di Indonesia yang tidak dapat diprediksi dan mengancam lahan produktif maka dituntut adanya manajemen ketersediaan beras yang efektif dan efisien, masa panen yang tidak teratur, hingga kejadian darurat yang memerlukan cadangan pangan misalnya, penanganan setelah terjadi bencana alam, penanggulangan daerah rawan pangan, dan bantuan wilayah dengan produktivitas yang masih rendah.

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, dengan luas wilayah yang mencapai 47.799,75 km² dan jumlah penduduk yang

mencapai 39,293 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018), tampaknya akan memiliki beban konsumsi masyarakat yang sangat besar pula untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dari tahun ke tahun. Pada tahun yang sama yakni Tahun 2017, Provinsi Jawa Timur memiliki luas lahan sawah seluas 1,175 juta hektar dan luas lahan ladang 94,694 ribu hektar. Ironisnya untuk luas lahan sawah mengalami penyempitan dari tahun sebelumnya yang mana di Tahun 2016 tercatat luas lahan sawah seluas 1,177 juta hektar. Akan tetapi pada luas lahan ladang mengalami peningkatan cukup signifikan dari yang semula 59,048 ribu hektar di Tahun 2016. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kawasan perumahan atau *real estate* yang menyebabkan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan perumahan untuk tempat tinggal penduduk di berbagai daerah di Jawa Timur.

Produksi padi di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi pada kurun waktu satu dekade terakhir. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatatkan pada Tahun 2017 produksi padi Jawa Timur sebesar 13,06 juta ton mengalami penurunan produksi dari Tahun 2016 yang tercatat sebesar 13,63 juta ton, turun sekitar 570 ribu ton. Luas panen pada tahun yang sama mengalami peningkatan yang pada Tahun 2016 tercatat seluas 227,85 ribu hektar, meningkat di Tahun 2017 menjadi seluas 228,52 ribu hektar. Perluasan lahan akan meningkatkan peningkatan luas panen yang mana secara langsung juga akan meningkatkan produksi padi di suatu wilayah. Hal ini dilakukan guna mewujudkan suatu wilayah dapat berswasembada beras dengan adanya produksi yang tinggi, dengan demikian ketahanan pangan di suatu wilayah juga akan terwujud apabila semua pihak dapat bekerjasama. Perkembangan produksi padi dan luas panen di Provinsi Jawa Timur pada periode Tahun 2007 – 2017 disajikan pada Gambar 1.4. dibawah ini.



Gambar 1.4. Perkembangan Produksi Padi (ton/tahun) dan Luas Panen Padi (ha/tahun) Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2017 (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017)

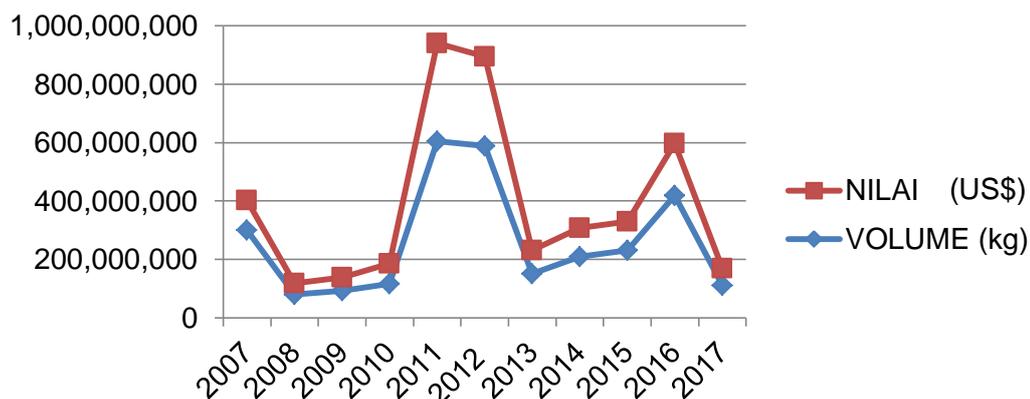
Peningkatan produksi dan luas panen padi setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur seperti yang dijelaskan di Gambar 1.4 seharusnya mampu memberikan jaminan ketersediaan beras di Provinsi Jawa Timur untuk beberapa tahun mendatang, akan tetapi fenomena yang terjadi di Jawa Timur masih terjadi impor beras yang meningkat dan berkelanjutan setiap tahunnya. Sehingga fenomena ini tentu menjadi permasalahan dalam hal Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Timur yang ingin dikaji lebih dalam terutama mengenai ketersediaan beras. Ketersediaan beras di suatu wilayah berasal dari dua sumber yakni lumbung pangan rumah tangga petani dan badan usaha milik pemerintah, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ketersediaan beras yang dikelola oleh badan usaha milik pemerintah dalam hal ini adalah BULOG. Ketersediaan beras dapat dilihat dari cadangan pangan atau stok akhir setiap tahunnya yang dimiliki oleh BULOG Provinsi Jawa Timur, setelah pemasukan ketersediaan berasal dari produksi ditambahkan impor kemudian dikurangi pengeluaran ketersediaan yang berupa konsumsi masyarakat di tahun tersebut.

Terdapat enam jenis beras yang di impor oleh Provinsi Jawa Timur sepanjang satu dekade terakhir (2007 – 2017), yakni komoditas beras dengan HS Code 10 digit : 1006101000 (Padi/Gabah), 1006303000 (Beras Ketan),

1006309900 (Beras setengah giling selain ketan), 1006409000 (Beras Pecah/Menir), 1006309000 (Beras Thai Hom Mali), dan 1006201000 (Beras setengah giling lainnya). Sedangkan pada Tahun 2018 impor beras sudah tidak menggunakan HS Code 10 digit kembali, dan berubah menjadi HS Code 8 digit dikarenakan telah menyesuaikan dengan regulasi Kepabeanan dan Cukai yang terbaru dan hanya menyisakan empat jenis beras yang diimpor (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Menurut data publikasi BPS Provinsi Jawa Timur (2018), negara eksportir utama untuk tujuan impor Provinsi Jawa Timur menurut pada tiap komoditas yang di impor, kontribusi terbesar dari negara – negara di dunia selain China, Amerika Serikat, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa. Kontribusinya sebesar 38,18 % dari keseluruhan total impor, sedangkan kontribusi kedua oleh China sebesar 22,69 %, disusul oleh ASEAN sebesar 21,08 % termasuk Thailand dan Vietnam, Uni Eropa sebesar 7,54 %, Amerika Serikat sebesar 6,64 %, dan yang terakhir Jepang dengan kontribusi sebesar 3,87.

Volume impor beras di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup drastis pada Tahun 2017 dari tahun sebelumnya yang sebesar 418,559 juta kilogram atau setara 418,559 ribu ton menjadi hanya sebesar 109,768 juta kilogram atau setara 109,768 ribu ton. Impor beras yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan lalu lintas impor beras yang berlangsung di Provinsi Jawa Timur tidak semuanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan beras domestik, akan tetapi Provinsi Jawa Timur menjadi pintu lalu lintas perdagangan ekspor dan impor komoditas khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur sehingga beras yang masuk hanya transit dan akan segera didistribusikan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pada Gambar 1.5. dapat dilihat mengenai perkembangan volume dan nilai impor beras Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2007 – 2017.



Gambar 1.5. Perkembangan Volume Impor (kg) dan Nilai Impor (US\$) Beras Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2017 (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019)

Ketersediaan beras di Provinsi Jawa Timur selain dipengaruhi oleh produksi dan luas panen, juga dipengaruhi oleh besarnya volume impor beras yang dilakukan pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Impor beras yang dilakukan akan menambah cadangan beras di BULOG, setelah produksi beras dikeluarkan untuk ekspor komoditas dan konsumsi masyarakatnya. Pengelolaan stok beras yang dilakukan oleh BULOG haruslah diukur secara akurat pada setiap periode waktunya, peramalan stok untuk cadangan pangan selama minimal 5 – 10 tahun mendatang seperti yang dilakukan di banyak negara maju juga harus diperhatikan.

Permasalahan pengelolaan stok beras atau cadangan pangan ini yang kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan dalam ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Timur. Impor yang terus – menerus dilakukan walaupun dengan adanya pengurangan volume impor beras, tetap bukan menjadi solusi terbaik dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras. Karena hanya akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kondisi produksi beras lokal, yang harus difokuskan adalah bagaimana memproduksi yang paling efektif dan efisien.

Setelah dilakukan penjabaran permasalahan diatas, maka dengan adanya permasalahan tersebut akan dilakukan penelitian yang mengkaji pengaruh luas

panen, produksi beras, volume impor beras, konsumsi beras, jumlah penduduk, harga beras domestik, dan harga gula domestik berkaitan dengan ketersediaan pangan khususnya komoditas beras di Provinsi Jawa Timur pada periode Tahun 2007 – 2017.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan luas panen, produksi beras, volume impor beras, konsumsi beras, jumlah penduduk, harga beras domestik dan harga gula domestik di Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2007 – 2017 dan peramalan ketersediaan beras dalam menjaga ketahanan pangan untuk lima tahun mendatang?
2. Bagaimana faktor – faktor luas panen, produksi beras, volume impor beras, konsumsi beras, jumlah penduduk, harga beras domestik dan harga gula domestik mempengaruhi ketersediaan beras dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perkembangan luas panen, produksi beras, volume impor beras, konsumsi beras, jumlah penduduk di, harga beras domestik, dan harga gula domestik Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2007 – 2017, sekaligus meramal ketersediaan beras dalam menjaga ketahanan pangan untuk lima tahun mendatang.
2. Menganalisis pengaruh faktor – faktor luas panen, produksi beras, volume impor beras, konsumsi beras, jumlah penduduk, harga beras domestik dan harga gula domestik mempengaruhi ketersediaan beras dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan peramalan ketersediaan selama lima tahun mendatang dan tolak ukur faktor-faktor yang mempengaruhi

dalam pengelolaan ketersediaan beras yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegunaan yang akan muncul dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah, mampu menjadi sumber informasi dalam merumuskan kebijakan produksi juga impor beras dalam menjaga ketersediaan beras sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur khususnya dan nasional secara menyeluruh.
2. Bagi Petani, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan pandangan mengenai kondisi perberasan di Jawa Timur dan rekomendasi strategi perberasan.
3. Bagi Pembaca, semoga dapat bermanfaat sebagai khasanah ilmu pengetahuan, literatur, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat mengenai ketersediaan beras di suatu wilayah.

1.5. Ruang Lingkup dan Asumsi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus hanya pada salah satu aspek ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan dalam hal ini adalah ketersediaan beras. Aspek lain dalam hal ketahanan pangan seperti akses pangan (*food accessibility*), penyerapan pangan (*food utilization*), stabilitas pangan (*food stability*) dan status gizi (*nutritional status*) diasumsikan pada kondisi *ceteris paribus* (keempat aspek lainnya yang mempengaruhi ketahanan pangan dianggap tetap). Lokus penelitian ini terbatas pada ketersediaan beras di Provinsi Jawa Timur dengan periode data *time series* 11 tahun dari Tahun 2007 – 2017.